

ANATOMI KONFLIK ANTARA KORPORASI DAN KOMUNITAS LOKAL PADA INDUSTRI GEOTERMAL DI JAWA BARAT

Dody Prayogo

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: *dodypo@yahoo.com*

Abstrak

Relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas mengalami banyak perubahan sejak reformasi politik (1998) dan digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (1999 dan 2004). Gejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah maraknya peristiwa konflik, diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokalnya. Berdasarkan sejumlah penelitian lapangan sebelumnya, anatomi konflik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi konflik. Dimensi sebab mencakup variabel perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, pemberdayaan dan tekanan demografi, serta ekonomi; dimensi dinamika meliputi fluktuasi, eskalasi dan bentuk konflik, intensitas, peran aktor dan lembaga, serta karakter budaya komunitas; dan dimensi resolusi mencakup kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru. Dengan model ini secara empirik dikaji kasus konflik antara korporasi dengan komunitas lokal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signifikan-tidaknya sebab konflik, tinggi-rendahnya dinamika konflik, signifikan-tidaknya resolusi konflik, dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konflik ini saling berhubungan dalam proses konflik.

Anatomy of Conflict between Corporation and Local Community in a Geothermal Industry in West Java

Abstract

Relationship between corporation and local community in mining and oil industry in Indonesia has changed significantly since political reform (1998) and the enactment of regional autonomy (1999 and 2004). Social conflicts arouse as main symptom of such changes, that almost all corporations had common problems in their relationship with local communities. Based on previous studies, the anatomy of conflicts can be elaborated into three dimensions: causes, dynamics and resolution of conflict. Cause of conflict includes variables of political reform, inequality, exploitation, domination, empowerment, demographic and economic pressure; dimension of dynamics includes variables of fluctuation, escalation and type of conflict, role of actor and institution, and local cultural characteristics; and dimension of resolution consist of variables of old and new social contracts. With this framework this study analyses empirically the conflict between corporation and local community in Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, West Java. The results indicate that there is a pattern of significance of causes, dynamics and resolution of conflicts, which is in general reveals a relation among dimensions of conflict.

Keywords: cause of conflict, conflict dynamics, conflict resolution, social conflict

1. Pendahuluan

Konflik antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang dan migas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terutama setelah reformasi politik 1998 hingga sekitar pertengahan tahun 2000-an. Gejala ini sangat menarik karena menunjukkan adanya

pola dalam bentuk peningkatan secara kuantitas maupun tingkat kekerasannya. Catatan lengkap tentang jumlah konflik secara empirik sulit diperoleh karena pada saat yang relatif bersamaan terjadi beragam peristiwa konflik yang lebih besar dan lebih menarik perhatian media massa seperti konflik antar kelompok etnik di Kalimantan dan antar kelompok agama di Ambon dan

Poso atau lainnya. Oleh sebab itu, konflik antara korporasi dengan komunitas lokal khususnya pada industri tambang dan migas relatif luput dari perhatian media massa nasional dan hanya sedikit saja yang tercatat menjadi berita.

Harian *Berita Buana* misalnya, berhasil mencatat sejumlah kejadian yang melibatkan industri tambang selama selang 1998-2003 (*Berita Buana*, 20 Maret 2003), antara lain konflik dengan perusahaan Kaltim Prima Coal, Unocal, Kideco Jaya Agung, Kelian Equatorial Mining, Tinto Harum, Indomuro Kencana, Expans Tomori Sulawesi, Permata Karya Graha Sakti, Meares Sopotan Mining, Prima Lestari, Pulau Indah Teknik, Inco, Newmont Minahasa Raya, Newmont Nusa Tenggara, Freeport Indonesia, Newcrest Halmahera, serta Exxon Mobil di Aceh. Kasus yang marak secara nasional adalah kasus dugaan pencemaran pada Newmont Minahasa Raya di Sulut, serta awal tahun 2006 terjadi pada Freeport Indonesia di Papua dan pada Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa. Hasil penelitian penulis antara tahun 1999-2003, menemukan fenomena yang sama pada perusahaan Unocal, BP, BHP-Arutmin, Newmont Sumbawa, Banpu, dan KPC, Banpu dan Berau Coal (Prayogo, 2004). Dari sejumlah kasus tersebut terlihat bahwa konflik meningkat setelah reformasi tahun 1998 dan dengan digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan 2004 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2004.

Bertolak dari uraian tersebut, fokus kajian ini diarahkan pada analisis tentang anatomi konflik antara korporasi dengan komunitas lokal dengan studi kasus pada industri geotermal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena penulis pernah melakukan penelitian untuk kasus yang sama di lokasi tersebut pada tahun 2001 sehingga telah memiliki kontak dan informasi awal. Selain itu, pada bulan Agustus 2006 terjadi konflik cukup besar di lokasi yang sama. Cakupan waktu kajian ini adalah antara tahun 1998 hingga tahun 2006. Dalam cakupan ini dibahas dimensi sebab, dimensi dinamika, serta dimensi resolusi konflik.

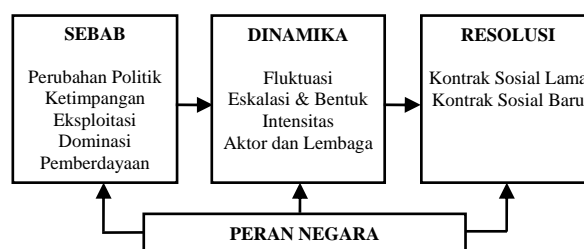
Fokus tentang konflik antara korporasi dengan komunitas lokal masih jarang dilakukan. Kajian yang ada lebih banyak tentang relasi *state-society* dalam konteks bahasan *civil society* (Barham, 1994), atau antara *state-business* dalam konteks bahasan ekonomi politik (Maxfield & Schneider, 1997). Hanya sedikit dan kurang komprehensif pembahasan tentang hubungan tiga sektor antara *state-society-business* namun bukan tata-relasi dua sektor antara *corporate-society* (Warhurst, 2001). Kajian sejenis di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang membahas konflik secara lebih umum antara korporasi dan komunitas serta pemerintah (Erman, 2005; Zulkarnaen, 2004). Kajian-kajian yang

ada umumnya berkenaan dengan *community relation* atau kajian tentang *community development* dalam konteks kegiatan *corporate social responsibility*.

Konflik dimaksudkan di sini sebagai “*two or more persons or groups manifest the belief that they have incompatible objectives*” (Kriesberg, 1998). Definisi ini sangat sederhana dan luwes namun memberi tempat atas adanya dimensi rasional dari konflik. Konflik antara korporasi dengan komunitas lokal berbeda dengan konflik antar kelas, etnik (seperti di Sampit), agama (seperti di Ambon dan Poso), atau *state and society* (seperti pada peristiwa reformasi politik Mei 1998) karena konflik korporasi-komunitas merupakan wujud dari perbedaan dan pertentangan kepentingan utamanya ekonomi. Konflik korporasi-komunitas lokal terjadi bukan untuk saling menghancurkan (sebagaimana antar kelompok agama atau etnik) atau menjatuhkan (seperti *state and society* dengan jatuhnya Rejim Orde Baru), melainkan untuk “memenangkan” kepentingan terutama kepentingan ekonomi komunitas terhadap korporasi (Prayogo dalam Achwan dkk., 2004).

Dalam model, komunitas bertindak sebagai pihak yang ofensif sementara korporasi sebaliknya, namun korporasi dilihat sebagai pihak yang mendatangkan sebab. Sejatinnya konflik antara korporasi dengan komunitas lokal berbeda dengan *ethnic conflict*, *class conflict*, *social movement*, *collective behavior*, *social riots*, *mass riots*, *mass behavior*, atau konsep sejenis lainnya karena konflik korporasi-komunitas lokal memiliki tujuan dan substansi yang lebih rasional dan fokus.

Khususnya untuk kajian negara sedang berkembang, terdapat beberapa teori yang dikembangkan untuk menjelaskan pola-pola hubungan ini. Myrdal melihat negara sedang berkembang cenderung berciri “*soft state*” (Martinussen, 1999). Peter Evans, Chalmers Johnson, dan Richard Sandbrook (*dalam* Sylvia Maxfield & Ben Ross Schneider, 1977) menggunakan istilah *weak state*—sebagai kebalikan dari *strong state*—untuk menjelaskan peran negara yang tidak mampu mendorong perubahan masyarakat. Kemudian, Ha-Joon Chang juga melihat pentingnya intervensi negara baik terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis, namun intinya sama yakni menekankan pentingnya peran negara sebagai juri dan manajer jika terjadi konflik.



Gambar 1. Kerangka Konflik Korporasi-Komunitas

Dilihat dari sejarah hubungan tiga sektor, Ostensson mengelompokkannya dalam lima periode, yakni di periode pertama negara lebih dominan namun pada periode terakhir korporasi yang lebih dominan, tidak pernah masyarakat yang dominan (Ostensson, 1996). Dari paparan ini jelas bahwa teori sosiologi pembangunan melihat relasi dan konflik antara korporasi dan komunitas lokal sebagai fenomena yang dinamis dapat berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat, tetapi relasi ini tidak dapat dipisahkan dari pentingnya peran negara.

Sebagai fenomena sosiologis, konflik antara korporasi dan komunitas lokal merupakan sebuah proses sosial yang muncul, berkembang dan berhenti secara terpola. Dari hasil-hasil penelitian penulis sebelumnya, dapat diidentifikasi proses konflik korporasi-komunitas lokal dapat dipetakan ke dalam tiga dimensinya, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi (Gambar 1). Dalam dimensi sebab, terdapat sejumlah variabel yang mendorong terjadinya konflik, antara lain perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan. Pada dimensi dinamika, terdapat variabel fluktuasi, eskalasi dan bentuk, intensitas serta peran aktor dan lembaga, yang semuanya turut menentukan dinamika dan kompleksitas konflik. Adapun pada dimensi resolusi terdapat pendekatan yang dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan kontrak sosial lama (menekankan paksaan) dan kontrak sosial baru (menekankan konsensus). Secara deduktif model konflik ini digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan proses konflik pada kasus industri geotermal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, secara induktif hasil penelitian lapangan pada studi kasus tersebut akan digunakan untuk “menguji” kerangka berpikir tersebut, apakah memperkuat, menyempurnakan atau menyangkal model ini.

Bertolak dari uraian kerangka teori tersebut, diajukan tiga pertanyaan penelitian, yakni (1) bagaimana dinamika konflik antara korporasi dengan komunitas lokal pada kasus industri geotermal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung? Apakah model ini berlaku (variabel fluktuasi, intensitas, bentuk, aktor dan lembaga berlaku), atau ada variabel lain yang juga signifikan? Dari seluruh variabel dinamika, variabel kunci apa yang paling dominan dalam dinamika konflik, serta bagaimana hubungan antar variabel dalam dimensi dinamika konflik? (2) Bagaimana kompleksitas dalam dimensi sebab konflik bekerja, apakah dimensi ini hanya ditandai oleh adanya variabel ketimpangan, eksploitasi, dominasi, perubahan politik, dan pemberdayaan masyarakat, atau adakah variabel lain yang mendorong terjadinya konflik korporasi-komunitas lokal? Variabel apa yang paling dominan menentukan sebab konflik, dan bagaimana hubungan antar variabelnya? (3) Apakah resolusi konflik cenderung

hanya mengacu pada model perubahan dari kontrak sosial “lama” menjadi kontrak sosial “baru”, dan melalui mekanisme dari bentuk “paksaan” menjadi “konsensus”? Adakah bentuk atau model resolusi lain? Bagaimana peran masing-masing sektor (negara, korporasi, dan komunitas) dalam menciptakan resolusi konflik yang berkelanjutan?

4. Metode Penelitian

Sebagaimana disinggung dalam kerangka pemikiran, studi ini berupaya menjelaskan kasus konflik di Pangalengan dengan terlebih dahulu membangun model kerangka berpikir, sekaligus menguji secara empirik keberlakuan kerangka berpikir tersebut. Dengan demikian jelas *stance* metodologis (dan pendekatan) studi ini adalah deduktif. Namun karena substansi konflik adalah masalah yang sensitif dan tidak seluruh warga dalam komunitas memahaminya, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif. Secara akademik pendekatan deduktif dengan menggunakan instrumen kualitatif dapat dibenarkan sejauh operasionalisasinya konsisten dengan prinsip-prinsip paradigmanya (Denzin & Lincoln, 2000). Tabel 1 memaparkan elaborasi dimensi dan variabel dalam kerangka pemikiran diturunkan menjadi indikator dan ukuran yang lebih operasional untuk studi lapangan. Tentunya dengan instrumen kualitatif, maka ukuran yang digunakan terbatas hanya pada skala nominal saja.

Untuk tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data disesuaikan dengan dimensi dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, *focus group discussion* (FGD), survei, dan pengumpulan data sekunder (Tabel 2). Metode utama pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam sementara metode lain digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara mendalam ini. Informan yang diwawancarai di lapangan berjumlah 20 orang. Setelah di lapangan, FGD ternyata tidak dapat digunakan karena substansi konflik yang sensitif. Selain itu, data hasil survei hanya dapat digunakan untuk ilustrasi saja karena *sampling* secara acak tidak dapat dilakukan. Jumlah sampel yang ditentukan secara purposif dan *snowball* adalah 31 orang. Observasi (berupa foto) dan data sekunder (berupa monograf, data kuantitatif atau data lainnya) digunakan untuk memperkaya dan memperkuat hasil-hasil wawancara mendalam.

Lokasi studi mencakup Kecamatan Pangalengan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan kawasan perkebunan teh yang dibangun sejak zaman Belanda. Wilayah ini merupakan daerah pertanian yang sangat subur, khususnya tanaman pangan dataran tinggi. Jumlah penduduk relatif padat untuk ukuran wilayah perdesaan di Jawa Barat.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Dimensi	Variabel	Indikator	Ukuran
Sebab	1) perubahan politik	1) pengaruh reformasi, otonomi daerah, pilkada	Sangat signifikan-tidak signifikan
	2) ketimpangan	2) kesejahteraan, komunikasi, segregasi	
	3) eksploitasi	3) sumber alam, lingkungan, tenaga kerja	
	4) dominasi	4) paksaan, aparat militer, birokrasi	
	5) pemberdayaan	5) peran NGO, pers, dana asing	
	6) peran negara	6) aktif, netral, dan fungsional	
Dinamika	1) fluktuasi	1) transisi antar tahap kegiatan	Tinggi, sedang, rendah
	2) intensitas	2) <i>magnitude, size, frequency, duration</i>	
	3) eskalasi dan bentuk	3) peningkatan ketegangan, bentuk konflik	
	4) peran aktor dan lembaga	4) mendorong-meredam	
	5) peran negara	5) aktif, netral, dan fungsional	
Resolusi	1) model sosial kontrak lama	1) penggunaan aparat militer/polisi, temporal, CSR sebagai pelengkap, konflik dalam komunitas, konflik berlanjut	Relevan-tidak relevan
	2) model sosial kontrak baru	2) konsensus dan pembentukan forum, ganti-rugi, rekrutmen tenaga lokal, program CD yang komprehensif, minimalisasi dampak, pemilikan lokal	
	3) peran negara	3) netralitas, regulasi, kepentingan, dan perangkat negara	

Tabel 2. Matriks Pengumpulan Data

Tujuan	Data Primer			Data Sekunder
	<i>Indepth</i>	Observasi	Survei	
Mencari data berkenaan dengan dimensi sebab konflik	<u>Alat:</u> pedoman wawancara. <u>Substansi:</u> seluruh informasi berkaitan dengan sebab konflik. <u>Informan:</u> tokoh kelompok bertikai dan yang terkait, ulama, guru, adat, karang taruna, asosiasi usaha, tukang ojek, polisi, NGO, pers, korporasi, dan informan lain yang terkait. <u>Pemilihan informan:</u> purposif dan <i>snowball</i> .	<u>Alat:</u> pedoman observasi, dan foto. <u>Cara kerja:</u> catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik. <u>Substansi:</u> informasi lain yang relevan dengan sebab konflik	<u>Alat:</u> kuesioner. <u>Substansi:</u> berkenaan dengan persepsi umum masyarakat tentang korporasi dan konflik; digunakan sebagai data penunjang. <u>Sampel:</u> acak warga umum, atau purposif terhadap warga kelompok tertentu.	<u>Substansi:</u> data-data penunjang, baik berkenaan dengan sebab-sebab konflik; maupun tentang komunitas lokal. <u>Sumber:</u> pers lokal, dinas statistik, korporasi, kecamatan, dan kantor desa.
Mencari data berkenaan dengan dimensi dinamika konflik	<u>Alat:</u> pedoman wawancara. <u>Substansi:</u> seluruh informasi berkaitan dengan proses konflik. <u>Informan:</u> tokoh kel. bertikai dan yang terkait, karang taruna, tukang ojek, polisi, NGO, pers, korporasi, dan informan lain yang terkait. <u>Pemilihan informan:</u> purposif dan <i>snowball</i> .	<u>Alat:</u> pedoman observasi, dan foto. <u>Cara kerja:</u> catat dan foto kegiatan, kejadian, dan bukti fisik. <u>Substansi:</u> informasi lain yang relevan dengan sebab konflik	Tidak diperlukan	<u>Substansi:</u> data-data penunjang berkenaan proses konflik. <u>Sumber:</u> pers lokal, kantor polisi, korporasi, kecamatan, dan kantor desa.
Mencari data berkenaan dengan dimensi resolusi konflik	<u>Alat:</u> pedoman wawancara. <u>Substansi:</u> seluruh informasi berkaitan dengan resolusi konflik. <u>Informan:</u> tokoh kelompok bertikai dan yang terkait, ulama, guru, adat, karang taruna, asosiasi usaha, tukang ojek, polisi, NGO, pers, korporasi, dan informan lain yang terkait. <u>Pemilihan informan:</u> purposif dan <i>snowball</i> .	Tidak diperlukan	<u>Alat:</u> kuesioner <u>Substansi:</u> berkenaan dengan usulan umum tentang resolusi konflik; digunakan sebagai data penunjang. <u>Sampel:</u> acak; warga umum, atau purposif terhadap warga kelompok tertentu.	Tidak diperlukan

Rujukan: Patton, 1990; Neuman, 1997; dan Cresswell, 1994.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara konseptual, anatomi konflik memang dapat dipetakan. Namun bekerjanya variabel-variabel konflik

berlangsung dalam proses yang kompleks. Hasil studi menunjukkan bahwa dari dimensi dinamika konflik, variabel penting yang perlu diperhatikan adalah intensitas konflik, yakni tingkat kekerasan konflik yang

dilihat dari kerusakan fisik dan korban manusia. Dimensi sebab variabel yang sangat penting diperhatikan adalah ketimpangan karena menentukan tingkat signifikansi secara keseluruhan terhadap peristiwa dan dinamika konflik. Memang tidak ada variabel tunggal sebagai sebab, namun variabel ketimpangan ternyata sangat signifikan. Dari dimensi resolusi konflik, variabel yang perlu diperhatikan adalah variabel *justice, equality*, dan *social contract*, bahwa resolusi konflik harus mencakup *justice and equality* dan dibangun dengan *social contract*. Berikut dipaparkan penjelasan lebih dalam tentang temuan-temuan penting studi.

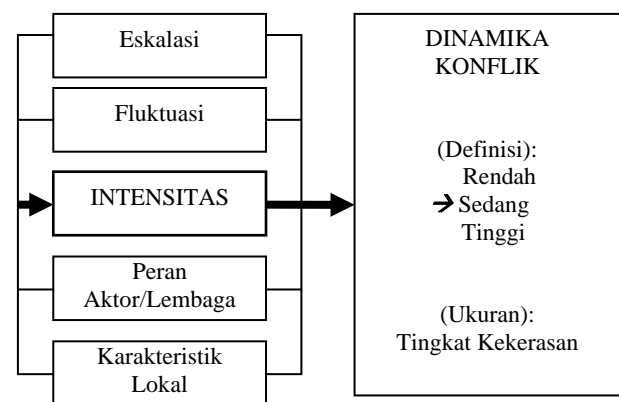
Dinamika Konflik

Hubungan antar variabel dalam dimensi dinamika konflik cukup kompleks. Secara substansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel utama yang perlu dilihat adalah intensitas konflik, yakni tingkat kekerasan. Namun terbentuknya intensitas konflik dipengaruhi pula oleh variabel lain seperti eskalasi, fluktuasi, peran aktor dan lembaga, serta karakteristik lokal. Secara umum, hubungan antara variabel dalam dimensi dinamika konflik dapat dipetakan polanya, yakni (1) semakin tinggi eskalasi konflik akan semakin tinggi intensitasnya, dan sebaliknya; (2) semakin tinggi fluktuasi (dan frekuensi) konflik akan semakin tinggi pula intensitasnya, dan sebaliknya. Dalam variabel peran aktor dan lembaga perlu dilihat apakah peran aktor dan lembaga sebagai "pendorong" atau "peredam"; jika sebagai "pendorong", maka (3a) semakin signifikan peran aktor dan lembaga akan semakin kuat intensitas konfliknya; dan sebaliknya sebagai "peredam", (3b) semakin signifikan peran aktor dan lembaga akan semakin rendah intensitasnya bahkan konflik dapat dicegah. Selain itu, variabel karakteristik lokal—yakni budaya dan organisasi—memiliki pengaruh pula terhadap intensitas konflik; yakni (4) semakin "keras" budaya lokal dan semakin disfungsi organisasi lokal akan semakin tinggi intensitas konflik, dan sebaliknya. Pola atau keteraturan ini memang masih berupa kecenderungan yang baru dapat dirumuskan secara kualitatif pada tingkat konsep.

Pada tingkat empirik akan lebih kuat jika dibuktikan keberlakuannya dengan data kuantitatif.

Implikasi lebih lanjut dari pola relasi antar variabel ini adalah bahwa dengan kriteria tersebut dapat didefinisikan "stadium" (tingkat) dinamika konflik, yakni "rendah", "sedang", dan "tinggi" (Gambar 2). Parameter untuk penetapan "stadium" ini didasarkan pada tingkat kekerasan konflik. Melihat tingkat kerusakan fisik, maka konflik pada industri geotermal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dapat didefinisikan tergolong "sedang". Pada sejumlah kasus dalam industri tambang dan migas yang lain, tingkat intensitas konflik bahkan mencapai derajat "tinggi" karena terjadi kerusakan fisik dan korban jiwa.

Implikasi lebih lanjut dapat dilihat dari perbandingan antara fenomena konflik pada industri tambang dan migas dengan industri lainnya seperti manufaktur dan jasa (Tabel 3). Terdapat kecenderungan pada industri ekstraktif, konflik sangat rentan terjadi antara korporasi dan komunitas lokal, sementara pada manufaktur antara korporasi dan pekerja, dan pada industri jasa antara korporasi dan konsumen. Hal demikian dimungkinkan terjadi melihat titik rentan terjadinya proses "eksploitasi". Pada industri tambang dan migas (atau



Gambar 2. Relasi antar Variabel dan Tingkat Dinamika Konflik

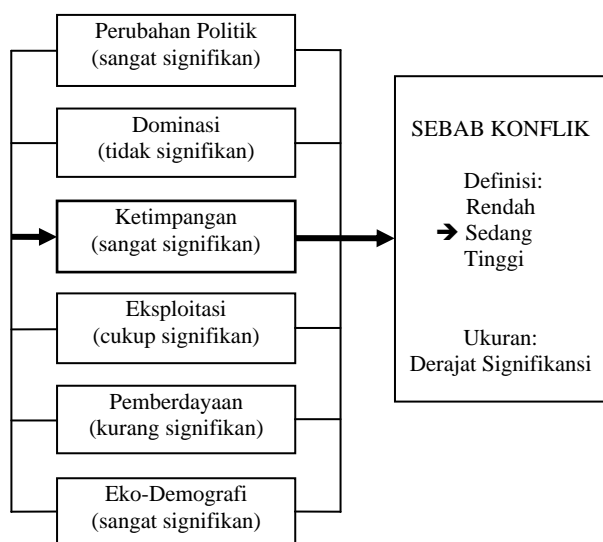
Tabel 3. Kecenderungan Tingkat Dinamika Konflik Korporasi-Stakeholder

Jenis Industri	Komunitas Lokal	Pekerja	Konsumen
Ekstraktif	Tinggi: sangat rentan terjadi konflik hingga ke bentuk kekerasan; korporasi mengambil sumber alam lokal	Sedang: tidak terlalu rentan terhadap konflik; kalau pun terjadi cenderung berbentuk non-kekerasan	Rendah: hampir tidak ada laporan konflik, terkecuali boikot produk oleh konsumen karena pencemaran lingkungan
Manufaktur	Sedang: tidak terlalu rentan terjadi konflik; terkecuali ada masalah khusus	Tinggi: sangat rentan terjadi konflik karena marjin korporasi sangat terkait dengan tingkat upah pekerja	Rendah: jarang terjadi konflik, terkecuali keluhan terhadap kualitas dan keamanan produk
Jasa	Rendah: tidak rentan terhadap konflik; interaksi dan silang kepentingan jarang terjadi	Sedang: tidak terlalu rentan terhadap konflik; terkecuali pada perusahaan yang bermasalah dengan manajemennya	Tinggi: sangat rentan terjadi konflik; sering terjadi selisih yang tajam antara harga dan kualitas pelayanan

ekstraktif umumnya) korporasi memang melakukan eksploitasi sumber alam lokal sehingga perseteruan cenderung terjadi dengan komunitas lokal yang merasa sebagai “pemilik utama” sumber alam tersebut. Sementara pada industri manufaktur peluang terjadinya eksploitasi adalah terhadap pekerja, terutama berkenaan dengan upah pekerja, karena “eksploitasi” cenderung terjadi melalui “pemotongan” upah pekerja. Pada industri jasa, “eksploitasi” cenderung terjadi terhadap konsumen, perseteruan terjadi karena “diskrepansi” antara kualitas pelayanan dan harga yang harus dibayar konsumen. Penjelasan ini menegaskan kaitan hakekat produksi masing-masing jenis industri, bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi dari proses produksi dapat menyebabkan “eksploitasi”—terhadap pekerja, komunitas lokal, atau konsumen—dan konflik merupakan indikator dari bekerjanya proses ini.

Sebab Konflik

Sebagaimana telah disinggung, dimensi sebab konflik utamanya dilihat dari derajat signifikansi variabel terhadap terjadinya peristiwa konflik. Untuk itu, derajat signifikansi sebab dapat ditetapkan dari tingkat keberlakuan masing-masing variabel pada kasus. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa dengan menggunakan skala kualitatif, ternyata tidak seluruh variabel sebab berlaku diterapkan dalam kasus di Pangalengan. Dari enam variabel, hanya tiga variabel yang berlaku “sangat signifikan”, selebihnya hanya



Gambar 3. Relasi antar Variabel dan Derajat Sebab

“cukup signifikan”, “kurang signifikan” dan bahkan “tidak signifikan” pengaruhnya terhadap konflik. Dengan demikian, kesimpulan umum pendefinisian derajat signifikansi dimensi sebab dapat diintegrasikan dari enam variabel tersebut sehingga kesimpulan umum menunjukkan derajat “sedang”.

Analisis lebih jauh dapat dilakukan terhadap dimensi sebab konflik. Secara konseptual masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga elemennya, yakni ekonomi, sosial-budaya dan politik (Tabel 4) dan melalui tiga elemen ini pemetaan sebab dapat dikaitkan dengan parameter yang lain. Parameter pertama yang terkait dengan elemen sebab adalah “peran” variabel sebab, apakah elemen sebab dapat didefinisikan sebagai *prima- causa* (sebab utama), *causa*, akselerator atau media sehingga pendefinisian dapat ditetapkan. Selanjutnya, elemen sebab dapat pula dikaitkan dengan tingkat “kerentanannya”, apakah sangat tinggi, sedang atau rendah mendorong terjadinya konflik. Terakhir, dengan melihat “implikasi” lebih luas dari ketiga elemen tersebut, dapat dijelaskan bagaimana implikasi lebih lanjut dari sebab konflik, sehingga dapat diidentifikasi resolusi yang relevan dikaitkan dengan masing-masing sebab. Dengan membuat matriks ini, maka dapat dipetakan keterkaitan antara tiga elemen sebab dengan parameter yang lain. Dari sejumlah kasus yang pernah penulis teliti, termasuk kasus geotermal di Pangalengan, elemen ekonomi berperan sebagai *prima causa* dari munculnya konflik. Elemen ini memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi, dan ini berlaku pada hampir semua kasus konflik korporasi dengan komunitas lokal. Implikasi dari elemen sebab ekonomi adalah tuntutan atas *equality* dan pemerataan *welfare* bagi masyarakat lokal dari hasil operasi tambang. Tekanan akhir-akhir ini bahkan lebih jauh lagi, komunitas lokal (pada tingkat kabupaten) bahkan menuntut *equity* atau *share of ownership* (agar menjadi salah satu pemilik) dalam kegiatan tambang sebagaimana terjadi pada kasus KPC di Kutai Timur dan Exxon Mobil di Cepu serta proses divestasi pada kasus Newmont Nusa Tenggara.

Resolusi Konflik

Dari data hasil penelitian lapangan di Pangalengan, dapat dipetakan tiga institusi penting yang terlibat langsung, antara lain (a) korporasi, (b) pemerintah dan (c) komunitas lokal. Dari dimensi substansinya, resolusi konflik dapat dilihat dari (1) posisi dan peran institusi yang terlibat, (2) pokok permasalahan yang terkait

Tabel 4. Implikasi dari Sebab Konflik

Elemen	Peran	Kerentanan	Implikasi
Ekonomi	<i>Prima-causa</i>	Sangat tinggi	<i>Welfare, equality</i> , dan jika mungkin <i>equity</i>
Sosial-budaya	<i>Causa</i> dan akselerator	Sedang	Pembauran, penataan pemukiman, fasilitas, dan kegiatan sosial
Politik	<i>Causa</i> dan media	Tinggi, pada masa transisi politik	Pemahaman peta sosial, manajemen <i>power</i> secara proporsional

dengan masing-masing institusi, dan (3) pemahaman masing-masing institusi tentang resolusi konflik. Analisis resolusi dapat dilakukan dengan menghubungkan institusi dengan variabel lain. Dari tabel ini dapat diidentifikasi perbedaan penting antara ketiga institusi dalam kaitannya dengan posisi, masalah yang dihadapi, serta persepsinya tentang resolusi konflik. Perbedaan ini sangat jelas saat masing-masing mendefinisikan permasalahan untuk mencapai resolusi yang diinginkan. Dilihat dari posisi dan perannya, korporasi adalah pihak yang “diserang” sementara komunitas sebagai “penyerang”.

Dilihat dari pokok masalah yang dihadapi, korporasi mengutamakan profit, sementara komunitas sangat mengutamakan prinsip pemerataan. Demikian pula dalam melihat resolusi konflik, korporasi melihat resolusi sebagai penyelesaian masalah atas “gangguan keamanan dan tekanan” (politik-ekonomi), sementara komunitas melihat sebagai “alat” dan “sarana” meningkatkan kesejahteraan melalui tekanan untuk menghasilkan “kesepakatan ulang.” Institusi pemerintah dapat dipetakan ke dalam posisi yang secara normatif diharapkan netral, memiliki legitimasi dengan sistem aturan dan sebagai juri, namun ternyata kurang mampu melakukannya tugas ini (*soft state*). Dari hasil pemetaan ini, resolusi konflik yang bersifat komprehensif merupakan upaya yang rumit karena masing-masing pihak berjalan dengan kepentingan dan caranya tanpa mencari titik temu jangka panjang di antara mereka.

Dari uraian dimensi sebab jelas telah teridentifikasi bahwa sebab utama konflik adalah ketimpangan. Inti pokok dari masalah ketimpangan ini adalah masalah *justice and equality*. Oleh sebab itu, upaya resolusi konflik harus mampu menyelesaikan atau memperkecil masalah keadilan dan pemerataan. Untuk tujuan itu, proses resolusi yang perlu dikembangkan adalah melalui kontrak sosial dan dengan prinsip yang menekankan pada *justice and equality*. Menimbang masing-masing peran yang berbeda, maka pada tingkat tindakan upaya resolusi ini dapat berbeda-beda langkahnya. Namun semua mengacu pada sebuah tujuan yang sama dan langkah operasionalnya harus dipilah menjadi tiga

periode waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk tahap jangka pendek langkah yang perlu dilakukan adalah menghentikan konflik kekerasan sehingga masing-masing institusi perlu mengambil langkah berdasarkan peran dan posisi masing-masing yang mengarah pada penghentian kekerasan (Tabel 6). Pada tahap ini juga perlu dibangun mekanisme dan infrastruktur sosial guna mempersiapkan pembentukan kontrak sosial untuk tahap jangka menengah. Pada tahap jangka menengah, langkah yang harus dilakukan adalah memformulasi kontrak sosial sebagai sebuah kesepakatan bersama. Implementasi keadilan dan pemerataan dioperasionalkan pada tahap ini melalui pendefinisian kembali hak dan kewajiban masing-masing pihak. Juga ditetapkan mekanisme bagaimana pelaksanaan kontrak sosial, berikut bentuk dan mekanisme *punishment and reward* bagi pelanggar kesepakatan. Formalisasi kesepakatan perlu dilakukan, bisa dalam bentuk Perda pada tingkat lokal atau PP pada tingkat nasional atau kesepakatan tertulis dua pihak. Untuk jangka panjang, langkah yang perlu dilakukan adalah melaksanakan isi dan memonitor pelaksanaan kontrak sosial melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.

Untuk lebih operasional lagi agar konsep *justice and equality* dapat diimplementasikan, dalam praktek tambang dapat dipetakan empat tingkat *justice and equality* dalam hubungan antara korporasi dengan komunitas lokal (Tabel 7). Tingkat pertama direpresentasikan oleh konsep filantropi, korporasi adalah lembaga profit yang fungsi utamanya mengejar profit. Namun karena terdapat kesenjangan yang tajam dengan komunitas di sekitarnya maka korporasi perlu melakukan upaya yang bersifat kepedulian atau “kedermawanan” sosial bersifat sukarela dan bukan kewajiban. Pendekatan seperti ini banyak digunakan oleh pendekatan konservatif, yakni bantuan kesejahteraan ditujukan untuk mereka yang dianggap tidak mampu (*the leftout*) (Spicker, 1995). Jika diteliti, hampir semua perusahaan tambang dan migas di Indonesia masih menggunakan konsep filantropi dalam relasinya dengan komunitas lokal.

Tabel 5. Permasalahan dalam Resolusi Konflik

	Korporasi	Pemerintah	Komunitas
Posisi dan Peran	Pihak defensif, penyebab konflik, namun memiliki <i>power</i> ekonomi	Posisi juri, sebagai fasilitator, kerap tidak netral, namun memiliki otoritas	Pihak ofensif, dirugikan, namun “tuan rumah,” pihak yang tereksploitasi
Masalah dan Hambatan	Prioritas profit dan filosofi bisnis eksploitasi, komunitas bukan stakeholder primer, kurangnya pedoman peraturan	Kebijakan dan aturan terbatas, menurunnya legitimasi, KKN	Kemiskinan, tiadanya keadilan dan pemerataan ekonomi, eksistensi lokal
Persepsi tentang Resolusi	Upaya menghilangkan tekanan, kepedulian, temporal, masalah keamanan dan manajemen	Penyelesaian atas gangguan keamanan, pendekatan paksaan menjadi konsensus, kadang konflik dijadikan “komoditas”	Keadilan, pemerataan kesejahteraan, pemenuhan hak, konflik kerap menjadi “komoditas”

Tabel 6. Rekomendasi Langkah Resolusi Kontrak Sosial

Resolusi	Korporasi	Pemerintah	Komunitas
Jangka Pendek:* menghentikan konflik, membangun infrastruktur pada masing-masing stakeholder	Penegasan komitmen korporasi, formulasi kebijakan tentang hak dan kewajiban, kompensasi, perbaikan CSR dan CD melalui reformulasi program, organisasi CR dan CD, budget yang memadai	Membentuk forum resolusi, membuat kebijakan, aturan hingga pedoman acuan pelaksanaan, membuat mekanisme bagi proses “kontrak sosial baru”	Pembenahan organisasi komunitas, mendefinisikan hak dan kewajiban komunitas, membuka saluran komunikasi
Jangka Menengah:** Memformulasikan kontrak sosial: isi dan mekanisme bagi keadilan dan pemerataan, memperkuat legitimasi otoritas	Menegaskan hak komunitas, melakukan upaya pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan bertahap, membangun komunikasi dua arah	Meningkatkan legitimasi, membuka komunikasi, memperkuat institusi negara sebagai juri	Mengubah pola perilaku konflik, mengembangkan ekonomi mandiri berbasis potensi lokal, dan mengembangkan mekanisme kontrol
Jangka Panjang:*** Melaksanakan isi kontrak sosial sebagai hasil kesepakatan sosial	Menempatkan komunitas dalam posisi sejajar, sebagai <i>shareholder</i> atau <i>owner</i>	Menghilangkan ketimpangan dan segregasi	Mengubah kultur konflik, menghilangkan kemiskinan, melepaskan ketergantungan pada sumber daya alam

* 1-2 tahun; **3-5 tahun; ***6-10 tahun

Tabel 7. Rekomendasi Operasionalisasi Konsep Keadilan dan Pemerataan

Tingkat <i>Justice and Equality</i>	Deskripsi Operasional
<i>Philanthropy</i>	<i>Charity</i> , korporasi sebagai donor, komunitas sebagai residual, prinsip sukarela, ditujukan agar tidak mengganggu proses produksi, pendekatan <i>conservatism</i> , jauh dari prinsip <i>justice and equality</i> .
<i>Share of profit</i>	Korporasi dominan, jumlah keuntungan dan prosentase pembagian ditentukan sepihak oleh korporasi, komunitas sudah masuk sebagai <i>primary stakeholder</i> , kewajiban korporasi hanya pada keuntungan, <i>equality</i> mulai berjalan namun hak komunitas secara prinsip belum tersentuh.
<i>Share of production cost</i>	Komunitas merupakan bagian integratif dalam sistem produksi, <i>equality</i> bagian dari <i>cost of production</i> , prinsip <i>equality</i> mulai tercapai namun <i>justice</i> belum, posisi korporasi masih lebih dominan atas komunitas.
<i>Share of ownership</i>	<i>Justice and equality</i> sudah ditegakkan, “hak” komunitas lokal ditegaskan dalam prosentase kepemilikan dan pembagian keuntungan, namun resiko kerugian turut pula ditanggung komunitas, posisi komunitas dan korporasi sejajar dalam praktek tambang.

Tingkat kedua dari keadilan dan pemerataan adalah *share of profit*, yakni korporasi memberikan sebagian keuntungan per tahunnya untuk didistribusikan bagi peningkatan kesejahteraan warga komunitas di sekitarnya.

Melalui konsep ini, komunitas sudah dimasukkan sebagai salah satu *primary stakeholder* korporasi. Walau prinsip *justice* belum tersentuh, *equality* sudah mulai berjalan karena prinsipnya semakin besar keuntungan korporasi akan semakin besar distribusinya terhadap komunitas. *Corporate social responsibility* merupakan wujud dari “bagi keuntungan” untuk komunitas lokal. Contoh perusahaan tambang di Indonesia yang menerapkan prinsip seperti ini kiranya belum ada, namun ada satu perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua justru melakukan *share of gross revenue* kepada komunitas lokal, sebuah konsep yang sangat jarang digunakan namun sebenarnya komunitas dapat memperoleh lebih besar daripada keuntungan.

Tingkat ketiga adalah *share of production cost*, korporasi memasukkan biaya untuk *equality* bagi

komunitas lokal ke dalam biaya produksi, misalnya—walaupun masih terhitung kecil—biaya *community development* ditetapkan berdasarkan persentase produksi per ton mineral yang diproduksi. Jika tingkatan ini sudah diterapkan, maka prinsip *equality* sudah dapat dikatakan tercapai. Contoh dari aplikasi model ini—walau belum sepenuhnya—telah digunakan pada industri batubara. Terakhir, tingkatan keempat adalah *share of ownership* atau *equity*. Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dari aplikasi prinsip *justice and equality* karena keadilan sudah diaplikasikan melalui penegasan hak komunitas sebagai salah satu pemilik saham. Tentunya *equality* disesuaikan dengan hasil keuntungan secara proporsional dengan besar *share* yang dimiliki masyarakat. Hal pokok dalam tingkatan ini adalah kedudukan komunitas dan korporasi adalah sejajar yaitu sama-sama sebagai pemilik dan komunitas lokal memiliki suara sebagaimana investor (umumnya) dalam penetapan kebijakan korporasi. Aplikasi dari prinsip ini—walaupun masih jauh dari sempurna—sudah digunakan pada sebuah perusahaan batubara di Kalimantan Timur dan perusahaan minyak di Jawa

Timur, yakni kabupaten setempat memiliki bagian dalam struktur pemilikan saham korporasi.

4. Simpulan

Uraian tentang implikasi terhadap model konflik di atas menunjukkan bahwa model yang dipaparkan di muka kiranya belum sempurna, walaupun dibangun atas sejumlah penelitian empirik sebelumnya. Dengan demikian tiga pertanyaan penelitian telah dapat dijawab. Pertama, seluruh variabel dalam dimensi dinamika konflik berlaku, bahkan perlu dilengkapi dengan variabel karakteristik lokal yang turut menentukan dinamika konflik. Dinamika konflik terutama dapat dilihat dari intensitas konflik guna mendefinisikan "stadium" konflik. Kedua, tidak seluruh variabel dalam dimensi sebab konflik berlaku, yakni variabel dominasi ternyata tidak relevan digunakan pada kasus yang diteliti. Namun dalam dimensi sebab perlu dilengkapi dengan variabel tekanan ekonomi dan demografi lokal. Variabel yang paling signifikan mendorong terjadinya konflik adalah ketimpangan, terutama ketimpangan ekonomi antara korporasi dan komunitas lokal. Ketiga, resolusi konflik dengan definisi "kontrak sosial lama" dan "kontrak sosial baru" kiranya masih kurang sempurna menjelaskan baik realitas empirik (praktis) maupun untuk membangun konsep resolusi yang ideal. Benar bahwa mekanisme resolusi konflik harus dicapai melalui mekanisme "kontrak sosial" sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela, namun isi kesepakatan tersebut secara ideal harus mengandung "keadilan" dan "pemerataan", disejajarkan dengan sebab konflik yang menyertainya.

Dengan demikian jika diperas menjadi beberapa kata, maka sebagai sebuah proses tiga dimensi—sebab, dinamika dan resolusi—dapat dipetakan variabel penting yang terlibat di dalamnya, yakni "ketimpangan" sebagai sebab, berkorelasi dengan "intensitas" sebagai dinamika konflik, berkorelasi dengan "keadilan dan pemerataan" sebagai resolusinya. Adapun negara harus dapat berperan sebagai "juri" yang netral dan otonom mengelola relasi antara korporasi dengan komunitas lokal. Merujuk pada apa yang telah diuraikan di atas tentang sebab, dinamika serta resolusi konflik, maka terdapat tiga rekomendasi penting dari hasil studi ini. Pertama, korporasi perlu melakukan perubahan paradigma, kebijakan dan tindakan dalam praktek bisnisnya dengan mengimplementasikan dimensi *justice* dan *equality* terhadap komunitas di sekitarnya. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan perundangan dan kebijakan terkait relasi antara korporasi dengan komunitas lokal. Ketiga, komunitas perlu mengembangkan budaya demokrasi dengan menekankan mekanisme konsensus secara lebih institusional menggantikan mekanisme konflik. Jika ketiga sektor ini dapat memperbaiki diri, maka secara konseptual relasi *corporate-state-society* akan dapat saling mendukung dan konstruktif, karena konflik

bukanlah mekanisme resolusi yang benar (secara legal) dan baik (secara moral).

Daftar Acuan

- Achwan, R., Nugroho, H., & Prayogo, D. (2004). *Overcoming violent conflict: Peace and development analysis in Central Kalimantan, West Kalimantan, and Madura*. Jakarta: UNDP, LabSosio UI and Bappenas.
- Barham, B., et al., eds. (1994). *State, firms and raw materials: The world economy and ecology of aluminium*. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
- Berita Buana, *Dinamika konflik industri tambang dengan komunitas lokal 1998-2003*, 20 Maret 2003.
- Chang, Ha-Joon. (2003). *Globalization, economic development and the role of the state*. Penang: Zed Books.
- Cresswell, J.C. (1994). *Research design, qualitative, and quantitative approach*. London: Sage Publications.
- Denzin, N.K. & Yvonna S.L. (2000). *Handbook of qualitative research*, 2nd Edition. London: Sage Publications.
- Erman, E. (2005). *Membaranya batubara, konflik kelas dan etnik, Ombilin- Sawahlunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. Depok: Desantara.
- Krieger, L. (1998). *Constructive conflict: From escalation to resolution*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Martinussen, J. (1999). *Society, state and the market, a guide to competing theories of development*. London: Zed Books.
- May, T. (ed.). (2002). *Qualitative research in action*. London: Sage Publications.
- Maxfield, S. & Schneider, B.R. (eds.) (1997). *Business and the state in developing countries*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Neuman, W.L. (1997). *Social research methods, qualitative and quantitative approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Ostenson, O. (October 1996). *Management of commodity resources in the context of sustainable development: Social impacts of mining*. Paper presented at Asian/Pacific Workshop, UNCTAD, Bandung, Indonesia.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. 2nd Edition. California: Sage Publications.

Prayogo, D. *et al.* (2001). *Identification of social mapping and relationship between community and magma Nusantara Ltd., Pangalengan, Bandung*. Research Report, Depok: LabSosio UI.

Prayogo, D. *et al.* (2004). Konflik antara korporasi dengan komunitas: Pengalaman beberapa industri tambang dan minyak di Indonesia. *Masyarakat*, 13, 64.

Spicker, P. (1995). *Social policy, themes and approaches*. London: Prentice Hall.

Warhurst, A. (June 2001). *Corporate social responsibility and the mining industry*. Paper presented at Euromines Seminar, Brussels, Belgium.

Zulkarnaen, I., Pudjiastuti, T.N., Saidi, A., & Mulyaningsih, Y. (2004). *Konflik di daerah pertambangan, menuju penyusunan konsep awal dengan kasus pada pertambangan emas dan batubara*. Jakarta: LIPI Press.